

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SE-SUMATERA

Rizky Fara Dilla Fasa, Nelly Masnila, Sri Hartaty

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : rizifadifa@gmail.com, nellymasnila@gmail.com, srihartaty@polsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima
26 Juli 2022
Direvisi
12 Juli 2022
Disetujui
23 Agustus 2022

Kata kunci:

Tingkat
Ketertgantungan, Belanja
Modal, Temuan Audit,
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera. Tingkat ketertgantungan, belanja modal, dan temuan audit digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2016-2020 dengan sampel 50 laporan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Ketertgantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keywords :

*Level of Dependence,
Capital Expenditure,
Audit Findings, Local
Government Financial
Statements*

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the level of disclosure of the Financial Statements of Provincial Governments throughout Sumatra. Dependency levels, capital expenditures, and audit findings were used in this study. This study used secondary data, namely the 2016-2020 Provincial Government Financial Statement Examination Report With a sample of 50 reports. The method of analysis used is multiple linear analysis with the SPSS program. The results showed that the level of dependence had a negative and insignificant effect on the level of disclosure of local government financial statements. Capital Expenditure has a positive and significant effect on the level of disclosure of local government financial

How to cite:

Fasa, Rizky Fara Dilla, Nelly Masnila, Sri Hartaty (2022) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera, *Jurnal Syntax Admiration* 3(8)
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.467>

E-ISSN:

2722-5356

Published by:

Ridwan Institute

statements. Audit findings have no effect on the level of disclosure of local government financial statements.

Pendahuluan

Otonomi daerah sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemberian otonomi daerah ini untuk membantu pemerintah pusat dalam bidang keuangan dan untuk mempertahankan kolonialisme. Yang diserahkan ke daerah hanya pengurusan keuangan dan penentuan jabatan untuk kaum pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, pemberian otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keperluan barang perang bahkan manusia atas permintaan Jepang. Setelah NKRI berdiri, pemberian otonomi daerah ada dua yaitu secara material dan residual. Material adalah pusat menetapkan secara rinci dan diserahkan ke daerah secara bertahap. Cara residual yaitu pusat menetapkan pusat menetapkan dulu dan sisa selebihnya dijadikan otonomi daerah (Sufianto, 2020).

Menurut penelitian dari (Sommaliagustina, 2019) mengungkapkan bahwa dalam otonomi daerah terdapat dampak negatif, salah satunya adanya kesempatan untuk melakukan tindak pelanggaran seperti korupsi di pemerintahan daerah. Banyak pejabat publik mengamburkan uang masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pergi ke luar negeri untuk studi banding, anggaran DPRD yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan masih banyak upaya lain yang dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi.

Good governance merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prastika (2020), penerapan *good governance* merupakan upaya yang dapat membantu untuk memberantas dan pencegahan korupsi maupun nepotisme dengan menerapkan prinsip *good governance*. Prinsipnya antara lain profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, supermasi hukum, efisiensi dan efektivitas. *Good governance* merupakan upaya yang pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi hak-hak politik. Untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas maka dibutuhkan mengawasi dan melihat apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik.

Pengungkapan dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi yang memberikan informasi keuangan entitas. Menurut (Wulandari, 2019) ada dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang wajib diungkapkan yang telah diatur sebelumnya. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan yang tidak termasuk dalam pengungkapan wajib.

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang menjadi konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Dalam UU ini mengungkapkan bahwa penyusunan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan (Veranti, 2018) tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 36,23%. Dapat diartikan tingkat pengungkapan tidak dilakukan secara penuh sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SAP. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian tentang hal ini antara lain (Hendriyani & Tahar, 2015a) (Andriani et al., 2019) (Khoirunnisa, 2020). Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diperoleh.

Tingkat ketergantungan daerah dapat ditinjau dari penerimaan dana transfer dari pusat. Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 transfer ke daerah merupakan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dapat berupa dana perimbangan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat memberikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Istana Negara, Jakarta pada 25 Juni 2021 mengungkapkan bahwa “Sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah.” Tingkat ketergantungan daerah menurut (Ramdhani, 2016) adalah ukuran kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan daerah yang diukur dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk dana transfer.

Tabel 1
Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Pusat

Provinsi	2019	2020
Aceh	0,2716	0,2691
Sumatera Utara	0,5582	0,5689
Sumatera Barat	0,6302	0,6289
Sumatera Selatan	0,6140	0,6289
Riau	0,5902	0,6107
Kepulauan Riau	0,6532	0,6494
Lampung	0,3635	0,3507
Jambi	0,6331	0,6474
Bengkulu	0,5212	0,5122
Kepulauan Bangka Belitung	0,6467	0,6672

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas/ dapat dilihat bahwa pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi peningkatan dalam tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,0205. Hal ini juga terjadi pada Provinsi Riau dimana terjadi peningkatan juga dalam tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,0205. Namun ada juga Pemerintah Daerah yang tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berkurang yaitu pada Provinsi Lampung. Tingkat ketergantungan yang tinggi menyebabkan munculnya rasa tanggungjawab dalam mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2019) tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ramdhani, 2016) tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Arza, 2019) tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini mengungkapkan terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat seperti pelayanan fasilitas umum maka dilakukan belanja daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut (Praptiningsih & Khoirunnisa, 2020) belanja modal dapat didefinisikan sebagai realisasi dari APBD untuk meningkatkan kekayaan atau aset daerah lebih dari satu tahun anggaran. Dana yang telah digunakan harus dapat menambah peningkatan layanan publik dan akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah. Penggunaan dana ini juga mendorong Pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga tingkat pengungkapan semakin tinggi.

Tabel 2
Belanja Modal Pemerintah Provinsi

Nama Provinsi	2019	2020
Aceh	Rp 3.162.088.165.983,04	Rp 1.755.472.079.256,47
Sumatera Utara	Rp 1.249.600.483.637,40	Rp 1.497.944.969.133,07
Sumatera Barat	Rp 1.062.230.453.034,52	Rp 736.888.360.714,63
Sumatera Selatan	Rp 1.606.219.507.432,26	Rp 1.644.700.767.363,54
Riau	Rp 1.161.037.468.852,18	Rp 919.245.593.570,52
Kepulauan Riau	Rp 633.107.634.788,34	Rp 586.608.798.242,52
Lampung	Rp 1.014.037.524.021,39	Rp 752.528.210.219,89
Jambi	Rp 866.500.805.931,25	Rp 642.695.707.788,37
Bengkulu	Rp 741.823.063.584,34	Rp 417.095.645.164,70
Kepulauan Bangka Belitung	Rp 441.201.203.550,86	Rp 436.502.107.450,47

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa belanja modal hampir semua mengalami penurunan. Hanya Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah menurun maka penelitian ini untuk melihat apakah naik turunnya belanja modal akan memengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2019) belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh (Praptiningsih & Khoirunnisa, 2020) belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini mengungkapkan terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Definisi temuan audit dalam penelitian (Amaliah, 2019) adalah Temuan audit merupakan penyimpangan, pelanggaran, atau ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan. Temuan audit dapat dijadikan sebagai koreksi dan pelajaran untuk periode selanjutnya. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang ditemukan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seharusnya dapat meningkatkan tingkat pengungkapan karena BPK akan meminta koreksi dan pihak Pemerintah Daerah akan memperbaiki segera dan membuat Pemerintah daerah semakin teliti dalam mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tabel 3
Temuan Audit LKPD Provinsi

Nama Provinsi	2019	2020
Aceh	21	32
Sumatera Utara	15	11
Sumatera Barat	19	17
Sumatera Selatan	11	12
Riau	13	28
Kepulauan Riau	15	11
Lampung	12	22
Jambi	11	41
Bengkulu	12	23
Kepulauan Bangka Belitung	10	8

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jambi mengalami peningkatan jumlah temuan audit sebanyak 30. Dengan ditemukan temuan audit sebanyak ini maka BPK akan meminta koreksi dan dapat meningkatkan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hendriyani & Tahar, 2015b) temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun hal sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh (Soleman et al., 2019) temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini mengungkapkan terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu antara lain tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit. Perbedaan lainnya juga terdapat pada tingkat pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II. Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada satu kota tertentu dan satu SKPD saja, pada

penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada tiap Provinsi se-Sumatera. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera”

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas (Prajitno, 2013). Penelitian kausalitas adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat antar variabel. Desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.

Penelitian dilakukan pada 10 Provinsi se-Sumatera periode 2018-2020 dengan menggunakan LHP LKPD setiap provinsi se-Sumatera yang diperoleh melalui website BPK. Penelitian ini dilakukan dalam kurun 5 bulan mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022 dengan periode 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah peneliti tidak langsung menerima dari sumber data (Sugiyono, 2016) sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, dan dengan menggunakan alat bantu program SPSS.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Ketergantungan Daerah

Tabel 5
Tingkat Ketergantungan se-Sumatera Periode 2016-2020

Provinsi	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat					Rata Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	0,13	0,27	0,26	0,27	0,27	0,24
Sumatera Utara	0,51	0,59	0,56	0,56	0,57	0,558
Sumatera Barat	0,58	0,65	0,62	0,63	0,63	0,622
Sumatera Selatan	0,34	0,64	0,60	0,61	0,63	0,564
Riau	0,52	0,57	0,57	0,59	0,61	0,572
Kepulauan Riau	0,05	0,65	0,65	0,65	0,65	0,53
Lampung	0,52	0,60	0,40	0,36	0,35	0,446
Jambi	0,71	0,66	0,62	0,63	0,65	0,654
Bengkulu	0,66	0,73	0,52	0,52	0,51	0,588
Kepulauan Bangka Belitung	1,00	0,68	0,55	0,65	0,67	0,71

Rata - Rata	0,502	0,604	0,535	0,547	0,554	0,5484
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Pada tabel 5 menjelaskan mengenai tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi terhadap pemerintah pusat se-Sumatera untuk periode 2016-2020. Tingkat ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan dana perimbangan yang diterima dengan total pendapatan pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah yang terdiri dari Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk 10 provinsi se-Sumatera periode 2016-2020 senilai 0,5484. Dapat dilihat dari tabel 4.2 Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata tingkat ketergantungan daerah tertinggi untuk periode tahun 2016-2020 senilai 0,71 dengan tingkat ketergantungan tertinggi pada tahun 2016 senilai 1,00 dan tingkat ketergantungan terendah pada tahun 2018 senilai 0,55. Sedangkan rata-rata terendah untuk tingkat ketergantungan dari tahun 2016-2020 untuk setiap provinsi adalah Provinsi Aceh senilai 0,24 dengan tingkat ketergantungan tertinggi pada tahun 2017, 2019 dan 2020 senilai 0,27 dan tingkat ketergantungan terendah pada tahun 2013 senilai 0,13.

Tingkat ketergantungan daerah semua provinsi se-Sumatera setiap tahun yang memiliki rata-rata tertinggi adalah tahun 2017 senilai 0,604. Dengan Provinsi Bengkulu dengan tingkat ketergantungan tertinggi senilai 0,73 untuk dan Provinsi Aceh dengan tingkat ketergantungan terendah senilai 0,27. Untuk tingkat ketergantungan daerah rata-rata terendah adalah tahun 2016 dengan tingkat ketergantungan daerah tertinggi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 1,00 dan terendah oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 0,05.

Tabel 5
Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Ketergantungan Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEPEND	50	,05	1,00	,5484	,16551
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 50 laporan keuangan pemerintah daerah dari 10 provinsi se-Sumatera untuk periode 2016-2020 memiliki rata-rata 0,5484. Provinsi Kepulauan Riau adalah sampel dengan tingkat ketergantungan terendah yaitu 0,05 pada tahun 2016. Dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertinggi tingkat ketergantungannya yaitu 1,00 pada tahun 2016. Nilai penyebaran rata-rata dari jumlah sampel 0,16551.

2. Belanja Modal

Tabel 5
Belanja Modal se-Sumatera Periode 2016-2020
(Dalam Satuan Miliar)

Provinsi	Belanja Modal					Rata Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	Rp2.578	Rp2.475	Rp2.504	Rp3.162	Rp1.498	Rp2.443
Sumatera Utara	Rp1.166	Rp2.121	Rp1.565	Rp1.250	Rp737	Rp1.368
Sumatera Barat	Rp1.117	Rp981	Rp1.100	Rp1.062	Rp1.645	Rp1.181
Sumatera Selatan	Rp846	Rp1.806	Rp1.537	Rp1.606	Rp919	Rp1.343
Riau	Rp2.336	Rp2.192	Rp1.047	Rp1.161	Rp587	Rp1.465
Kepulauan Riau	Rp397	Rp576	Rp620	Rp633	Rp753	Rp596
Lampung	Rp1.126	Rp1.678	Rp17.293	Rp1.014	Rp643	Rp4.351
Jambi	Rp1.010	Rp991	Rp785	Rp867	Rp417	Rp814
Bengkulu	Rp444	Rp929	Rp618	Rp742	Rp437	Rp634
Kepulauan Bangka Belitung	Rp333	Rp414	Rp316	Rp441	Rp1.755	Rp652
Rata - Rata	Rp1.135	Rp1.416	Rp2.738	Rp1.194	Rp939	Rp1.485

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk 10 provinsi se-Sumatera untuk periode 2016-2020 sebesar Rp1.484.585.493.659. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah provinsi dengan total belanja modal terendah yaitu sebesar Rp.315.597.833.094 dan provinsi dengan total belanja modal tertinggi adalah Provinsi Lampung sebesar Rp.17.293.277.432.844 pada tahun 2018.

Tabel 6
Hasil Analisis Deskriptif Belanja Modal
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnBM	50	26,48	30,48	27,6730	,71006
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan dari 50 laporan keuangan pemerintah Provinsi dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata belanja modal dengan natural logaritma adalah sebesar 27,6730. Nilai belanja modal terbesar sebesar 30,48 dengan Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan nilai belanja modal terendah sebesar 26,48 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Nilai penyebaran rata-rata dari jumlah sampel 0,71006.

3. Temuan Audit

Tabel 7
Temuan Audit se-Sumatera Periode 2016-2020

Provinsi	Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan					Rata Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	29	26	24	21	32	26,4
Sumatera Utara	31	22	17	15	11	19,2
Sumatera Barat	17	17	14	19	17	16,8
Sumatera Selatan	22	28	24	11	12	19,4
Riau	30	30	30	13	28	26,2
Kepulauan Riau	24	15	15	15	11	16
Lampung	18	14	23	12	22	17,8
Jambi	18	14	26	11	41	22
Bengkulu	22	17	13	12	23	17,4
Kepulauan Bangka Belitung	21	29	14	10	8	16,4
Rata Rata	23,2	21,2	20	13,9	20,5	19,76

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata untuk 10 provinsi se-Sumatera untuk periode 2016-2020 senilai 19,8. Provinsi Aceh memiliki rata-rata temuan audit tertinggi untuk periode tahun 2016-2020 senilai 26,4 dengan temuan audit tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 32 temuan dan temuan audit terendah pada tahun 2019 sebanyak 21 temuan. Dan Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat temuan audit terendah dengan rata-rata 16 dengan temuan audit terbanyak pada tahun 2016 dengan 24 temuan. Sedangkan temuan terendah pada Provinsi Riau pada tahun 2020 dengan temuan sebanyak 11 temuan.

Sedangkan untuk temuan audit provinsi se-Sumatera tahun 2016-2020 yang memiliki rata-rata tertinggi adalah tahun 2016 senilai 23,2. Dengan Provinsi Sumatera Utara dengan temuan audit tertinggi sebanyak 31 untuk dan Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat ketergantungan terendah sebanyak 17. Untuk rata-rata terendah untuk temuan audit provinsi se-Sumatera untuk periode 2016-2020 adalah tahun 2019 dengan temuan tertinggi oleh Provinsi Aceh dengan 21 jumlah temuan audit dan yang terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung dengan 10 temuan.

Tabel 8
Hasil Analisis Deskriptif Temuan Audit
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FIND	50	8	41	19,76	7,291
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 8 temuan audit tertinggi sebanyak 41 temuan oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung pada tahun 2020 dengan jumlah 8 temuan. Rata-rata jumlah temuan audit dari 50 laporan keuangan pemerintah Provinsi dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata 19,76. Nilai penyebaran rata-rata dari jumlah sampel 7,291.

4. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 9

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera Periode 2016-2020

Provinsi	Tingkat Pengungkapan LKPD dalam CaLK					Rata Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	0,91	0,82	0,91	0,91	0,91	0,89
Sumatera Utara	0,73	0,64	0,64	0,82	0,82	0,73
Sumatera Barat	0,91	0,91	0,91	1,00	0,91	0,93
Sumatera Selatan	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Riau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kepulauan Riau	0,82	0,73	0,45	0,55	0,55	0,62
Lampung	0,82	1,00	0,91	1,00	0,91	0,93
Jambi	0,82	0,82	0,73	0,82	0,82	0,80
Bengkulu	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Kepulauan Bangka Belitung	0,64	0,64	0,27	0,27	0,27	0,42
Rata Rata	0,84	0,83	0,76	0,81	0,79	0,805

Pada tabel 9 menjelaskan mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan se-Sumatera untuk periode 2016-2020 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. Dalam lampiran tersebut Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk 10 provinsi se-Sumatera untuk periode 2016-2020 senilai 0,805. Provinsi Riau memiliki rata-rata Tingkat Pengungkapan LKPD dalam CaLK tertinggi untuk periode tahun 2016-2020 senilai 1,00. Yang memiliki rata-rata terendah untuk periode 2016-2020 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,42 dengan tingkat

pengungkapan tertinggi pada tahun 2016 dan 2017 senilai 0,64 dan terendah pada tahun 2016, 2017 dan 2018 senilai 0,27.

Tingkat pengungkapan LKPD provinsi se-Sumatera tahun 2016-2020 yang memiliki rata-rata tertinggi adalah tahun 2016 senilai 0,84. Tingkat pengungkapan LKPD tertinggi diraih oleh Provinsi Riau dengan tingkat pengungkapan 1,00. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tingkat pengungkapan terendah dengan nilai 0,64.

Tabel 10

Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera Tahun 2016-2020

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Disclosure	50	,27	1,00	,8048	,18699
Valid N (Listwise)	50				

Berdasarkan tabel 10 tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tertinggi adalah 1,00 oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, Provinsi Riau tahun 2016-2020, dan Provinsi Lampung tahun 2017 dan 2019. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2020 dengan nilai 0,27. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD dari 50 laporan keuangan pemerintah Provinsi dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata 8048. Nilai penyebaran rata-rata dari jumlah sampel 0,18699.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Ketergantungan (*DEPEND*) terhadap Tingkat Pengungkapan (*DISCLOSURE*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1,678. Hasil pengujian untuk variabel independen tingkat ketergantungan memiliki nilai t hitung sebesar - 0,484 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,631 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($- 0,484 < 1,678$). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan (*DEPEND*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Amaliah (2019), yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori akuntabilitas, terdapat pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana (Pemerintah Daerah) kepada otoritas (Pemerintah Pusat) yang lebih tinggi dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian (Pandansari, 2016) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa ketergantungan daerah memiliki tidak pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer lebih dari pemerintah

provinsi maka akan semakin sulit bagi pemerintah daerah tersebut dalam mengungkapkan laporan keuangannya, karena akan semakin banyak yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah tersebut.

2. Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat Pengungkapan (DISCLOSURE)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1,678. Hasil pengujian untuk variabel independen belanja modal memiliki nilai t hitung sebesar 3,308 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,308 > 1,678$). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel belanja modal (BM) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Praptiningsih & Khoirunnisa, 2020) menyatakan bahwa Belanja modal secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Belanja modal yang besar sering kali menjadi kendala dalam pengungkapan LKPD, karena belum seluruh belanja modal yang telah digunakan dan dicatat dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan di mana belanja modal yang dimiliki pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kinerja keuangan dan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tidak kecil, sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk mengungkap informasi dalam laporan keuangannya agar terlihat baik pada prinsipil yang nantinya tidak akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andriani et al., 2019) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menyatakan bahwa belanja modal yang besar tidak juga mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan dengan lebih luas dan mendetail dikarenakan banyaknya belanja membuat pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pengungkapan.

3. Pengaruh Temuan Audit (*FIND*) terhadap Tingkat Pengungkapan (*DISCLOSURE*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1,678. Hasil pengujian untuk variabel independen temuan audit memiliki nilai t hitung sebesar 1,675 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,101 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,675 > 1,678$). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel temuan audit (*FIND*) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hendriyani & Tahar, 2015b), bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besarnya jumlah temuan audit tidak memengaruhi tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan audit yang mereka temukan, dengan adanya perbaikan maka opini yang diberikan akan mendapatkan opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Hasil yang diperoleh tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Amaliah, 2019) bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini disebabkan semakin banyak jumlah temuan audit yang ditemukan oleh BPK, pengungkapan informasi pada LKPD yang dilakukan pemda semakin banyak pula. Dengan adanya temuan-temuan tersebut, BPK akan meminta perbaikan kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pengungkapan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap tiga hipotesa yang telah diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Variabel tingkat ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BIBLIOGRAFI

- Amaliah, E. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13. [Google Scholar](#)
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14. [Google Scholar](#)
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015a). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1). [Google Scholar](#)
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015b). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. [Google Scholar](#)
- Khoirunnisa, J. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. [Google Scholar](#)
- Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463. [Google Scholar](#)
- Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.(Tersedia Di [Http://Komunikasi.Uinsgd.Ac.Id](http://Komunikasi.Uinsgd.Ac.Id)). [Google Scholar](#)
- Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD, dan Opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah nusa tenggara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 277–285. [Google Scholar](#)
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130. [Google Scholar](#)
- Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161. [Google Scholar](#)
- Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2019). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), [Google Scholar](#)
- Sommaliagustina, D. (2019). *Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala*

Daerah. 1(1), 44–58. [Google Scholar](#)

Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(02), 271–288. [Google Scholar](#)

Sugiyono, P. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi). *Bandung: Alfabeta Cv.* [Google Scholar](#)

Veranti, R. I. (2018). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3). [Google Scholar](#)

Wulandari, I. T. (2019). Pengaruh total asset dan Return On Asset terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Rizky Fara Dilla Fasa, Nelly Masnila, Sri Hartaty (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

